



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PALOPO
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam membangun suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yakni kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 3 ayat (1) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro. Semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen tahunan OPD sebagai implementasi pentahapan rencana strategis OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan RKPD, RENSTRA OPD, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Bidang.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-

Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk periode satu tahun sebagai tahapan pelaksanaan RPJMD dan juga sebagai acuan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD. Penyusunan Renja 2022 merupakan tahun keempat bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo dalam Revisi Renstra Balitbangda 2018-2023 dan Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo sebagai unit kerja Penelitian dan Pengembangan di daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab koordinasi dibidang penelitian dan pengembangan yang diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dengan deskripsi tugas yang sangat strategis bagi Pemerintah Kota Palopo maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo harus didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2023 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (LN tahun 2020 nomor 259);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028;
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Balitbang Kota Palopo Tahun 2023 yakni:

a. Maksud

Rancangan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2023 memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran serta merupakan tolak ukur berjalannya dan pengendalian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Balitbangda Tahun 2023 yakni: 1) Sebagai bahan masukan penyusunan RKPD Tahun 2023; 2) Sebagai acuan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 3) Sebagai alat control organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan; 4) Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, Rancangan Renja Balitbangda Kota Palopo Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Capaian Renstra Balitbangda 2018-2023
- 2.2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022
- 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda
- 3.2. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda
- 4.3 Program dan Kegiatan Balitbangda Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Rencana Kerja Balitbangda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BALITBANGDA Kota Palopo melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2021. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BALITBANGDA dan pencapaian Renstra BALITBANGDA.

A. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo, secara menyeluruh dimulai dengan mengidentifikasikan target kinerja ke berbagai indikator kinerja. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja dapat diukur dari indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Pengukuran kinerja berdasarkan target kinerja dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2021

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	27%	27%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah Yang Menghasilkan Inovasi	29%	29%	100%

Pada Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah realisasinya cukup baik yakni sekitar 100% dari 27% pertumbuhan inovasi yang direncanakan, realisasi pertumbuhan inovasi yakni 27%. Nilai 27% ini merupakan pertumbuhan dari inovasi tahun 2020 dibandingkan tahun 2021, dimana pada tahun 2020, inovasi yang dihasilkan adalah 11 dan tahun 2021 sebanyak 14 inovasi.

Pada Indikator Sasaran yakni Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi yakni 14 perangkat daerah dari 49 perangkat daerah yang difasilitasi. Adapun fasilitasi yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Penyusunan Inovasi Daerah.

Untuk Indikator Program Penelitian dan Pengembangan yakni Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan terealisasi sebesar 100%, dimana dari 6 (enam) rekomendasi penelitian/pengembangan yang diusulkan, seluruhnya dapat terealisasi hingga akhir tahun 2021.

Untuk layanan kesekretariatan, persentase kinerja keterpenuhan dukungan kesekretariatan sebesar 100%, meskipun ketika melihat realisasi keuangan hanya 97% disebabkan Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional hanya terealisasi sebesar 62,33%. Hal ini terjadi karena Biaya STNK Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Operasional yang dianggarkan melebihi pembayaran yang dibayarkan pada UPTD Samsat Kota Palopo.

Secara umum, kinerja Balitbangda sebesar 100%, meskipun untuk realisasi keuangan hanya 97,49% dikarenakan beberapa anggaran yang direncanakan

melebihi belanja dan hal ini merupakan sebuah hasil yang baik, meskipun belum sempurna dan masih memerlukan beberapa perbaikan pada waktu selanjutnya

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021.

Secara rinci, anggaran dan realisasi berdasarkan Program, Belanja Langsung pada Balitbangda tahun 2021 yaitu:

Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Program Balitbangda 2021

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	Program Penelitian dan Pengembangan	464,807,250	464,582,800	99.95
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,328,974,915	2,259,165,696	97
	TOTAL	2,793,782,165	2,723,748,496	97.49

Tahun 2021, anggaran Belanja yang dikelola Balitbangda Kota Palopo sebesar 2.793.782.165 yang dialokasikan pada 2 program, dan 11 Kegiatan dan 20 sub kegiatan. Dari Jumlah dana tersebut untuk Belanja terealisasi sebesar Rp. 2,723,748,496 (atau sebesar 97,49%.

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Untuk tahun berjalan, yakni tahun 2022 dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 2.683.145.569 diharapkan akan mencapai kinerja fisik dan keuangan sebesar 100% namun tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Adapun target kinerja program yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program Balitbangda Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi Yang Diwujudkan	100%
2	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100%

Pada Tahun 2022, anggaran yang diberikan akan digunakan untuk 2 (dua) jenis Program dan 24 (Dua Puluh Empat Sub Kegiatan) kegiatan. Secara singkat, program dan anggaran pada tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.4. Program dan Anggaran Balitbangda Tahun 2022

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan	478,411,319
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,204,734,250
	Total	2,683,145,569

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 & PERKIRAAN PENCAPAIAN 2021
KOTA PALOPO**

Perangkat Daerah: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palopo

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA) SAMPAI TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM/KEGIATA N S.D. TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021						PERKIRAAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022					
							TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN REALISASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		6		7		8	
	Urusan Wajib																	
	Pemerintahan Umum																	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	1,435,782,921	100	464,582,800	100	464,807,250	100	464,582,800	100.00	99.95	100	478,411,319	100	478,411,319	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	3	289,750,000	2	141,494,000	2	141,500,000	2	141,494,000	100.00	100.00	1	87,000,000	1	87,000,000	100	100
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidangpemerintahan umum yang dihasilkan	3	289,750,000	2	141,494,000	2	141,500,000	2	141,494,000	100.00	100.00	1	87,000,000	1	87,000,000	100	100

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil kelitbangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	3	216,671,602	1	68,000,000	1	68,000,000	1	68,000,000	100.00	100.00	1	72,000,000	1	72,000,000	100	100
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	3	216,671,602	1	68,000,000	1	68,000,000	1	68,000,000	100.00	100.00	1	72,000,000	1	72,000,000	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	7	511,850,000	3	199,695,000	3	199,707,250	3	199,695,000	100.00	99.99	2	160,000,000	2	160,000,000	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan perindustrian dan perdagangan yang dihasilkan	1	74,651,500	1	78,895,000	1	78,900,000	1	78,895,000	100.00	99.99		-		-		
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil kelitbangan koperasi dan UKM yang dihasilkan	2	152,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75,000,000	1	75,000,000	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	4	285,198,500	2	120,800,000	2	120,807,250	2	120,800,000	100.00	99.99	1	85,000,000	1	85,000,000	100	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang difasilitasi	58	417,511,319	15	55,393,800	15	55,600,000	15	55,393,800	100.00	99.63	19	159,411,319	19	159,411,319	100	100
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	3	150,636,319	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,411,319	1	54,411,319	100	100
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Inovasi Daerah	3	266,875,000	1	55,393,800	1	55,600,000	1	55,393,800	100.00	99.63	1	105,000,000	1	105,000,000	100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	6,669,586,856	100	2,259,165,696	100	2,328,974,915	100	2,259,165,696	100.00	97.00	100	2,204,734,250	100	2,204,734,250	100	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	24	3,000,000	8	1,000,000	8	1,000,000	8	1,000,000	100.00	100.00	8	1,000,000	8	1,000,000	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	21	1,500,000	7	500,000	7	500,000	7	500,000	100.00	100.00	7	500,000	7	500,000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	1,500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	100.00	100.00	1	500,000	1	500,000	100	100

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	36	5,524,431,150	12	1,928,066,017	12	1,997,341,000	12	1,928,066,017	100.00	96.53	12	1,841,477,050	12	1,841,477,050	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	66	5,359,431,150	22	1,873,066,017	22	1,942,341,000	22	1,873,066,017	100.00	96.43	23	1,786,477,050	23	1,786,477,050	100	100
	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	1,500	162,000,000	500	54,000,000	500	54,000,000	500	54,000,000	100.00	100.00	500	54,000,000	500	54,000,000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	6	3,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	100.00	100.00	2	1,000,000	2	1,000,000	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	6	19,800,000	2	6,600,000	2	6,600,000	2	6,600,000	100.00	100.00	2	6,600,000	2	6,600,000	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatkelolakan	173	19,800,000	167	6,600,000	167	6,600,000	167	6,600,000	100.00	100.00	170	6,600,000	170	6,600,000	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	35	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35	17,500,000	35	17,500,000	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	35	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35	17,500,000	35	17,500,000	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatkelolakan	2	523,901,106	2	156,501,754	2	156,627,715	2	156,501,754	100.00	99.92	2	158,711,000	2	158,711,000	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	12	15,840,000	4	3,920,000	4	3,960,000	4	3,920,000	100.00	98.99	4	5,280,000	4	5,280,000	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	165	508,061,106	46	152,581,754	45	152,667,715	46	152,581,754	102.22	99.94	50	153,431,000	50	153,431,000	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	18	64,748,000	-	-	6	-	-	-	-	-	6	19,874,000	6	19,874,000	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	18	64,748,000	-	-	6	-	-	-	-	-	6	19,874,000	6	19,874,000	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	3	417,286,600	3	134,125,245	3	134,132,200	3	134,125,245	100.00	99.99	3	127,722,200	3	127,722,200	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan	1,830	86,997,000	600	24,496,500	600	24,499,000	600	24,496,500	100.00	99.99	610	28,999,000	610	28,999,000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	6	113,920,000	2	38,695,645	2	38,700,000	2	38,695,645	100.00	99.99	2	28,600,000	2	28,600,000	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	24	216,369,600	8	70,933,100	8	70,933,200	8	70,933,100	100.00	100.00	8	70,123,200	8	70,123,200	100	100

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai</i>	20	98,920,000	20	32,872,680	20	33,274,000	20	32,872,680	100.00	98.79	20	31,850,000	20	31,850,000	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3	78,750,000	1	26,036,550	1	26,250,000	1	26,036,550	100.00	99.19	1	26,250,000	1	26,250,000	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	9	1,800,000	3	186,980	3	300,000	3	186,980	100.00	62.33	3	600,000	3	600,000	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai	45	10,500,000	15	3,500,000	15	3,500,000	15	3,500,000	100.00	100.00	15	3,500,000	15	3,500,000	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	7,870,000	1	3,149,150	1	3,224,000	1	3,149,150	100.00	97.68	1	1,500,000	1	1,500,000	100	100
	JUMLAH			8,105,369,777		2,723,748,496		2,793,782,165		2,723,748,496		97.49		2,683,145,569		2,683,145,569		100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel**

2.5. pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Palopo.

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	13
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah			18%	22%	29%	37%	49%	18%	22%	29%	37%	49%	
4	Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Balitbangda dalam memberikan pelayanan penelitian dan pengembangan di Kota Palopo antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan Balitbangda yang belum optimal sebagai OPD yang baru dibentuk.
2. Kualitas SDM yang belum sesuai standar kebutuhan unit kerja
3. Adanya inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan
4. Kurang optimalnya pemetaan urgensi serta peran dan potensi stakeholder kelitbangan dalam mendorong system inovasi daerah
5. Pemanfaatan hasil kelitbangan yang dijadikan landasan kebijakan strategis daerah masih rendah
6. Implementasi rencana dan penganggaran kelitbangan masih rendah
7. Rendahnya jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah
8. Belum optimalnya implementasi kebijakan inovasi daerah di Kota Palopo

Tugas dan fungsi Balitbangda yang memberikan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan, berusaha senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal serta aspiratuisf bagi pengguna layanan.

Adapun isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting strategis antara lain:

1. Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting untuk menunjang aktivitas layanan dan kinerja Balitbangda dalam penyusunan dokumen hasil penelitian dan pengembangan sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Penganggaran yang cukup juga merupakan factor yang dapat mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang baik dan berkualitas. Dengan penganggaran yang representative, tema penelitian serta cakupan masalah yang akan diteliti dapat lebih luas sehingga memberikan lebih banyak rekomendasi sebagai solusi peningkatan pembangunan di Kota Palopo
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah sangat membutuhkan pemahaman yang baik dalam tata cara penyusunan program dan anggaran. Selain hal tersebut, perencanaan dan penganggaran sebuah lembaga kelitbangan daerah harus terpadu dan tersinkronisasi dengan program strategis di pusat dan provinsi, sehingga koordinasi dan sinergitas dapat terjalin dalam menyusun program kelitbangan daerah
4. Pemetaan urgensi, peran, dan potensi stakeholder kelitbangan penting untuk segera dilaksanakan untuk

mendukung berjalannya system inovasi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target kinerja Balitbangda dengan arahan Walikota terkait prioritas program kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Balitbangda Kota Palopo berdasarkan Rancangan RKPD sebagaimana terlampir pada **Tabel 2.6** lampiran Rancangan Renja Balitbangda 2023

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2023

BALITBANGDA KOTA PALOPO

Perangkat Daerah: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palopo

NO	RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	Persen	734,949,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	100	Persen	734,949,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Kota Palopo	Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturanyang ditindaklanjuti	1	Dokumen	188,500,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Kota Palopo	Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturanyang ditindaklanjuti	1	Dokumen	188,500,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang dihasilkan	1	Dokumen	188,500,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang dihasilkan	1	Dokumen	188,500,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Palopo	Jumlah hasil kelitbangan sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	1	Dokumen	50,350,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Palopo	Jumlah hasil kelitbangan sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti	1	Dokumen	50,350,000	
	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	1	Dokumen	50,350,000	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	1	Dokumen	50,350,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Palopo	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	2	Dokumen	204,449,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Palopo	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	2	Dokumen	204,449,000	

	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan	1	Dokumen	54,449,000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Palopo	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan	1	Dokumen	54,449,000	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	1	Dokumen	150,000,000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	1	Dokumen	150,000,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Palopo	Jumlah inovasi yang difasilitasi	24	Inovasi	291,650,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Palopo	Jumlah inovasi yang difasilitasi	24	Inovasi	291,650,000	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Palopo	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark		Dokumen	-	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Palopo	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1	Dokumen	-	
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Kota Palopo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi yang dihasilkan	1	Dokumen	291,650,000	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Kota Palopo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi yang dihasilkan	1	Dokumen	291,650,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palopo	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	Persen	2,491,099,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Palopo	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	Persen	2,491,099,000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8	Dokumen	1,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8	Dokumen	1,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7	Dokumen	500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	7	Dokumen	500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	Laporan	2,161,036,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	Laporan	2,161,036,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palopo	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23	Orang	2,124,236,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palopo	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	23	Orang	2,124,236,000	

	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500	SPJ	34,800,000	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	500	SPJ	34,800,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2	Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	2	Laporan	2,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	2	Laporan	7,100,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palopo	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	2	Laporan	7,100,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palopo	Jumlah Aset yang ditatkelolakan	173	Buah	7,100,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palopo	Jumlah Aset yang ditatkelolakan	173	Buah	7,100,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	0	Orang	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	0	Orang	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palopo	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	Pasang	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palopo	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	Pasang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	2	Sub Kegiatan	141,105,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palopo	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	2	Sub Kegiatan	141,105,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palopo	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	3	Eksampelar	3,960,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palopo	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	3	Eksampelar	3,960,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palopo	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	70	SPPD	137,145,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palopo	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	70	SPPD	137,145,000	
	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Buah	18,188,000	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	6	Buah	18,188,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palopo	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6	Buah	18,188,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palopo	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	6	Buah	18,188,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	3	Jenis	138,468,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	3	Jenis	138,468,000	
	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palopo	Jumlah Surat Menyurat, ATK. Cetak dan Penggandaan	620	Surat	34,479,480	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palopo	Jumlah Surat Menyurat, ATK. Cetak dan Penggandaan	620	Surat	34,479,480	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Kota Palopo	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2	Rekening	12,980,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Kota Palopo	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	2	Rekening	12,980,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palopo	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8	Jenis	91,008,520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palopo	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	8	Jenis	91,008,520	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai	20	Buah	42,390,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai	20	Buah	42,390,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1	Unit	26,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1	Unit	26,250,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	4	Unit	600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palopo	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	4	Unit	600,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palopo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai	15	Buah	10,600,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palopo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai	15	Buah	10,600,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	Buah	4,940,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palopo	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	1	Buah	4,940,000	
JUMLAH ANGGARAN YANG DIUSULKAN						3,226,048,000	3,226,048,000						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo tidak memiliki Usulan Program Masyarakat, baik melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

*Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2023
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Palopo*

Tabel T-C.32.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun 2023, merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023. Oleh karena itu sangat penting artinya untuk mewujudkan akselerasi pencapaian tujuan strategis untuk Kota Palopo yang semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang professional, kompeten dan berkinerja tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik, hingga tahun 2019 telah dilakukan upaya peningkatan SDM aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Untuk memperbaiki prosedur dan tata laksana dalam manajemen ASN di lingkup Balitbangda Kota Palopo telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Analisis Evaluasi Jabatan lingkup Balitbnagda Kota Palopo.

Di tingkat Pemerintah Kota Palopo dalam RPJP Kota Palopo 2005-2025 isu strategis yang dirumuskan yakni 1) isu peningkatan intensitas pemandaatan lahan; 2) isu konversi dan alih fungsi kawasan hutan; 3) Isu meningkatnya tekanan pada RTH; 4) Isu berkurangnya resapan air; 5)Isu meningkatnya tekanan pada wilayah pesisir dan laut; 6) Isu meningkatnya tekanan pada wilayah DAS; 7) Isu kualitas sumber mata air dan sungai utama; 8) Isu Resiko bencana; 9) Isu menurunnya mutu air dan udara ; 10) Isu Meningkatnya migrasi penduduk; 11) Isu menurunnya kualitas lingkungan pemukiman; 12) Isu kualitas SDM yang lemah; 13) Isu kualitas pendidikan yang rendah; 14) Isu penigkatan pelayanan kesehatan masyarakat; 15) Isu tingginya laju pertumbuhan penduduk; 16) Isu kesejahteraan social yang

rendah; 17) Isu kualitas hidup dan peran perempuan yang rendah; 18) Isu harmonisasi kehidupan yang belum kondusif; 19) Kesenjangan hasil pembangunan; 20) Produktivitas ekonomi yang rendah; 21) profesionalisme ASN rendah; 22) Kapasitas infrastruktur rendah; 23) Kualitas layanna umum yang rendah.

Sedangkan dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023 isu strategis bidang/urusan Penelitian dan Pengembangan yakni: 1) SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan; 2) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbnagan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih terbatas; 3) Iklim Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik

Secara khusus Balitbangda Kota Palopo merumuskan kesimpulan terhadap isu-isu daerah dalam RPJPD dan RPJMD menjadi isu strategis Balitbangda yang nantinya akan dikongkritkan melalui program dan kegiatan kelitbangan (penelitian dan pengembangan) daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Balitbangda Kota Palopo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balitbangda
Kota Palopo Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
1	Terwujudnya Inovasi Daerah yang Berkualitas		Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	33%
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	49%

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo dirumuskan dengan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi Walikota. Visi Walikota Palopo dalam Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 yaitu ***Terwujudnya Palopo sebagai kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada tahun 2023.***

Balitbangda sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta pembangunan inovasi Daerah membantu mewujudkan Visi Kota Palopo melalui Misi Ke-3 dari RPJMD yakni *Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.*

Adapun tujuan, sasaran dan strategi untuk mewujudkan Misi ke 3 (M3) tersebut yakni:

Tujuan dan Sasaran Misi 3,

Tujuan: Terwujudnya birokrasi profesional kompetitif dan melayani. Sedangkan untuk *sasaran* dalam mewujudkan tujuan tersebut yakni meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk Sasaran *Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah* maka Strategi yang digunakan adalah:

Memantapkan regulasi, struktur, tata kelola, dan layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah, yang dapat dicapai dengan cara:

1. Penyediaan regulasi daerah
2. Penegakan regulasi daerah
3. Peningkatan kualitas data, informasi , perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan

Memantapkan SDM dan kinerja Aparatur dapat terwujud dengan cara:

1. Peningkatan kompetensi dan motivasi kerja aparatur pemerintah

Mengembangkan sarana dan prasarana, cakupan dan kualitas layanan dengan penetapan prinsip e-Government dilaksanakan dengan cara:

1. Peningkatan upaya pemerataan teknologi informasi
2. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi
3. Optimalisasi E-government

Untuk Sasaran *meningkatkan kualitas pelayanan publik*, maka strategi yang digunakan adalah:

Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standardisasi pelayanan dengan cara:

1. Peningkatan kapasitas SDM terkait pelayanan publik
2. Peningkatan sarana dan prasarana
3. Penguatan sistem/regulasi dan penegakan standardisasi pelayanan

Memantapkan sarana dan prasarana, inovasi, teknologi sistem layanan dan aksesibilitas publik atas layanan dengan penerapan prinsip Smart City

1. Peningkatan layanan, aksesibilitas dan kepuasan publik atas layanan
2. Sinergitas Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Dengan memperhatikan visi, misi , tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD Kota Palopo 2018-2023, program dan kegiatan Balitbangda serta Perkiraan Pencapaian Tahun 2024 dituangkan dalam **Tabel 3.2.**

Pada Tahun 2023, Program Balitbangda berjumlah 2 (dua) Program. Pagu indikatif yang dirumuskan sebesar **Rp. 3.226.048.000** yang bersumber dari APBD Kota Palopo

Dengan rumusan tersebut, apabila program/kegiatan yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD maupun pagu indikatif, maka Balitbangda Kota Palopo hanya akan melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak terlebih dahulu dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk layanan kesekretariatan.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA PALOPO**

Perangkat Daerah: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palopo

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
1.20	Pemerintahan Umum								
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	-	100	Persen	734,949,000	APDB		100 Persen 539,408,762
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i>		1	Dokumen	188,500,000	APDB	1	Dokumen 97,350,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang otonomi daerah yang dihasilkan	Kota Palopo	1	Dokumen	188,500,000	APDB	1	Dokumen 97,350,000
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Jumlah hasil kelitbangan sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti</i>	<i>Kota Palopo</i>	1	Dokumen	50,350,000	APDB	1	Dokumen 81,258,762

	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palopo	1	Dokumen	50,350,000	APDB		1	Dokumen	81,258,762
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti		2	Dokumen	204,449,000	APDB		2	Dokumen	180,400,000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan	Kota Palopo	1	Dokumen	54,449,000	APDB		1	Dokumen	84,700,000
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	Kota Palopo	1	Dokumen	150,000,000	APDB		1	Dokumen	95,700,000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi	Kota Palopo	24	Inovasi	291,650,000	APDB		24	Inovasi	180,400,000
	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Invensi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	Kota Palopo	0	Dokumen		APDB		1	Dokumen	61,600,000
	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Fasiltasi Inovasi yang dihasilkan	Kota Palopo	1	Dokumen	291,650,000	APDB		1	Dokumen	118,800,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	Persen	2,491,099,000	APDB		100	Persen	2,269,502,506
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8	Dokumen	1,000,000	APDB		8	Dokumen	1,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7	Dokumen	500,000	APDB		7	Dokumen	500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	1	Laporan	500,000	APDB		1	Laporan	500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	12	Laporan	2,161,036,000	APDB		12	Laporan	1,847,477,050
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	23	Orang	2,124,236,000	APDB		23	Orang	1,786,477,050

	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	500	SPJ	34,800,000	APDB		500	SPJ	60,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2	Laporan	2,000,000	APDB		2	Laporan	1,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset		2	Laporan	7,100,000	APDB		2	Laporan	6,600,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatkelolakan	Kota Palopo	173	Buah	7,100,000			173	Buah	6,600,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatkelolakan		2	Sub Kegiatan	141,105,000	APDB		2	Sub Kegiatan	219,703,356
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4	Eksampelar	3,960,000	APDB		4	Eksampelar	5,280,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	70	SPPD	137,145,000	APDB		70	SPPD	214,423,356
	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	6	Buah	18,188,000	APDB		6	Buah	25,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	6	Buah	18,188,000	APDB		6	Buah	25,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3	Jenis	138,468,000	APDB		3	Jenis	136,622,100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat, ATK. Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	620	Surat	34,479,480	APDB		620	Surat	31,898,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	Kota Palopo	2	Rekening	12,980,000	APDB		2	Rekening	28,600,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	8	Jenis	91,008,520	APDB		8	Jenis	76,123,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai	Kota Palopo	20	Buah	42,390,000	APDB		20	Buah	33,100,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1	Unit	26,250,000	APDB		1	Unit	26,250,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	4	Unit	600,000	APDB		4	Unit	800,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai	Kota Palopo	15	Buah	10,600,000			15	Buah	3,850,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	Kota Palopo	1	Buah	4,940,000			1	Buah	2,200,000
JUMLAH ANGGARAN YANG DIUSULKAN						3,226,048,000					2,808,911,268

Palopo, Juni 2022

Kepala Balitbangda



ANDI ENCENG, SE, M.Si.

NIP 19691209 199402 2 002

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pertimbangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023 serta tujuan, sasaran dan strategi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2023 ditampilkan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 500.000,-, dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Laporan;
- 2) Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp. 500.000,-, dilaksanakan untuk menyusun dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Laporan;

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 2.124.236.000,-, dilaksanakan untuk membayar Gaji dan Tunjangan 20 Orang ASN Balitbangda Kota Palopo;

2) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 34.800.000,-, dilaksanakan untuk melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 500 Laporan pertanggungjawaban

3) Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 2.000.0000,-, dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan selama 1 (satu) tahun sebanyak 12 Laporan keuangan

3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

1) Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.100.000,-, dilaksanakan untuk pengelolaan asset sebanyak 167;

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp. 3.960.000,-, dilaksanakan untuk penyediaan bahan bacaan sebanyak 3 eksampelar.

2) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp 137.145.000,-, dilaksanakan untuk penyediaan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 50 Kali.

5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 18.188.000,-, dilaksanakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 buah.

6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 34.479.480-, dilaksanakan untuk penyediaan kegiatan surat menyurat sebanyak 610 surat;
- 2) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 12.980.000-, dilaksanakan untuk penyediaan pembayaran rekening internet dan rekening publikasi pada media massa selama 1 tahun;
- 3) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dianggarkan sebesar Rp. 91.008.520-, dilaksanakan untuk penyediaan 8 layanan umum selama 1 tahun.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 26.250.000-, dilaksanakan untuk penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit
- 2) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 600.000-, dilaksanakan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas operasional sebanyak 4 unit
- 3) Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dianggarkan sebesar Rp. 10.600.000-, dilaksanakan untuk pemeliharaan 15 unit peralatan dan mesin.
- 4) Sub Kegiatan: Pemeliharaan rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dianggarkan sebesar Rp.

4.940.000-, dilaksanakan untuk pemeliharaan 1 buah gedung kantor.

II. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 188.500.000-, dilaksanakan untuk penyusunan dokumen penelitian bidang pemerintahan umum.
2. Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 1) Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dianggarkan sebesar Rp. 50.350.000, dilaksanakan untuk penyusunan dokumen penelitian bidang aspek-aspek social;
3. Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - 1) Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp. 54.449.000-, dilaksanakan untuk penyusunan dokumen penelitian bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000-, dilaksanakan untuk penyusunan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.
4. Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Sub Kegiatan: Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan dianggarkan sebesar Rp. 291.650.000-, dilaksanakan untuk penyusunan laporan fasilitasi inovasi daerah

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Balitbangda Kota Palopo Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 yang berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan akuntabilitas Balitbangda serta dapat digunakan sebagai dasar penyusunan APBD 2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Balitbangda 2023 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berdampak positif terhadap kinerja aparatur Balitbangda ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Palopo, Juni 2022

Kepala Balitbangda,



ANDI ENCENG, SE, M.Si

NIP 19691209 199402 2 002



PEMERINTAH KOTA PALOPO

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Jln. A. Sulthani No. 2 Telp/Fax (0471) 22577
KOTA PALOPO**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR: 900 / /BALITBANGDA/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PALOPO TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penyusunan Rencana Kerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembang Daerah Kota Palopo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
12. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (LN tahun 2020 nomor 259)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 - 2028

19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2023;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Awal, Rancangan serta Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2023;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim tersebut bertanggungjawab kepada Walikota Palopo melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal Desember 2021
KEPALA BADAN,



ANDI ENCENG, SE, M.Si.
NIP 19691209 199402 2 002

ANDI ENCENG, SE, M.Si.
NIP 19691209 199402 2 002